

## **Pendanaan Hijau : Perlu Keberpihakan bagi LSM Lokal**

Maraknya donor asing yang masuk ke Indonesia, terutama untuk pembangunan hijau rendah karbon, membuka kesempatan lembaga swadaya masyarakat lokal mengakses dana. Namun, perlu pengarusutamaan bagi lembaga lokal. Jika dibiarkan persaingan terbuka dengan LSM internasional, lembaga lokal akan kalah.

"Kelemahan LSM lokal adalah menyusun proposal. Kalau diadu tanpa pengarusutamaan pasti kalah dari asing. Masih perlu pengarusutamaan untuk LSM lokal," kata anggota Majelis Wali Amanat Millennium Challenge Account-Indonesia, Zumrotin K Susilo, di sela-sela peluncuran Fasilitas Kemakmuran Hijau (FKH), Kamis (3/7), di Jakarta.

Hal itu dikatakan terkait peluang LSM mendapatkan donor langsung melalui FKH dengan dua jendela hibah, yaitu Hibah Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat dan Hibah Energi Terbarukan. Satu hibah FKH lain, yaitu Hibah Kemitraan, ditujukan bagi proyek yang didukung pendanaan swasta.

Kelebihan LSM lokal, kata Zumrotin, adalah pengalaman lapangan dan mampu meningkatkan kapasitas. Mereka mengenal kondisi lokal, memahami kearifan lokal, dan tahu kondisi sosial budaya masyarakat.

Peluncuran FKH dilakukan Direktur Eksekutif MCA-Indonesia JW Saputro, yang dihadiri Wakil Presiden Direktur Millennium Challenge Corporation (MCC) dari Washington DC, Wakil Dubes AS untuk Indonesia Kristen Bauer, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Lukita D Tuwo, dan Direktur Proyek FKH Budi Kuncoro.

Menurut Lukito, hibah-hibah itu mensyaratkan kepemilikan dari pemerintah daerah atau masyarakat setempat. "Agar berkesinambungan. Tidak hilang ketika program selesai," ujarnya.

Fasilitas Kemakmuran Hijau merupakan salah satu proyek Hibah Compact MCC dari Pemerintah AS. Jumlah dana total 600 juta dollar AS (Rp 7,2 triliun) dengan jangka 2013-2018. "Ini hibah terbesar dari AS buat Indonesia," ujar Bauer. Sebesar 332,5 juta dollar untuk FKH. Adapun hibah MCC bagian dari US-Indonesia Comprehensive Partnership ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden AS Barack Obama pada 19 November 2011. (ISW)